

# PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN ANGKA PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**DITERIMA**

Agustus 2023

**DIREVISI**

September 2023

**DISETUJUI**

Oktober 2023

**Angger Gigih Prasetyo\*, Bahtiar Fitanto**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

**Abstract:** The Special Region of Yogyakarta (DIY) is a province in Java with the highest poverty rate from 2012-2022, which is supported by the high Human Development Index (HDI) and the low unemployment rate with the Open Unemployment Rate (TPT) indicator. This study aims to determine the effect of HDI and TPT on the poverty rate in DIY, and also to find out the actual conditions in DIY Province by using the granger causality test method, panel data regression analysis and descriptive analysis. With this method, it results that there is no causality relationship between variables. For panel data regression analysis, the best model is Random Effect Model (REM) with the result that HDI has a negative and significant effect and unemployment rate has a positive and significant effect on poverty rate. Meanwhile, the actual condition of DIY is that the poverty rate in DIY is not like the statistical calculation of the Central Bureau of Statistics (BPS), because BPS statistical indicators cannot explain the poverty rate in DIY Province. The high poverty rate in DIY based on BPS is due to unique consumption patterns and is supported by the socio-cultural conditions that exist there.

**Keywords:** Poverty Rate, Human Development Index, Unemployment Rate

**Abstrak:** Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan tingkat kemiskinan tertinggi dari tahun 2012-2022, yang padahal ditunjang dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rendahnya tingkat pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IPM dan TPT terhadap tingkat kemiskinan di DIY, dan juga untuk mengetahui kondisi sebenarnya di Provinsi DIY dengan menggunakan metode uji kausalitas granger, analisis regresi data panel dan analisis deskriptif. Dengan metode tersebut menghasilkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antar variabel. Untuk analisis regresi data panel didapatkan model terbaik yaitu *Random Effect Model* (REM) dengan hasil bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan serta angka pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan kondisi DIY sebenarnya tingkat kemiskinan di DIY tidaklah seperti perhitungan statistik Badan Pusat Statistik (BPS), karena dengan indikator statistika BPS belum bisa menjelaskan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY. Tingginya tingkat kemiskinan di DIY berdasarkan BPS dikarenakan adanya pola konsumsi yang unik dan didukung oleh kondisi sosial budaya yang ada di sana.

**Kata Kunci:** Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Pengangguran

**INDEKSASI**

Google Scholar

**PENULIS****KORESPONDENSI**

Angger Gigih Prasetyo

Email:

anggergigih4@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis, Universitas  
Brawijaya, Indonesia**Cite this as:**Prasetyo, A. G. & Fitanto, B. 2023. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Development Economic and Social Studies*. Volume 02, Number 4, Pages 760-773. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.05>

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang ditemukan di berbagai negara, pada umumnya permasalahan ini banyak dialami oleh negara berkembang. Keberhasilan suatu negara dapat diukur dengan menggunakan indikator kemiskinan itu sendiri. Pengentasan kemiskinan dijadikan sebagai tujuan pertama dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)* yaitu "no poverty" oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2015-2030 (Arifin, 2020). Selain itu, Indonesia juga menetapkan tujuan pembangunan nasional yang salah satunya yaitu pengentasan kemiskinan seperti yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (Piang et.al., 2023). Kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan sampai saat ini, seperti yang dialami oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi fokus bahasan di penelitian ini. Provinsi DIY mempunyai daya tarik tersendiri seperti wisata dan pendidikan. Meskipun Provinsi DIY menjadi provinsi yang terkenal banyak wisata, perguruan tinggi, dan kuliner terkenal, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Provinsi DIY merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Pulau Jawa. Selain itu, Provinsi DIY merupakan provinsi yang berbeda dari provinsi lainnya. Provinsi DIY mempunyai keunikan tersendiri dari segi sosial dan kebudayaannya yang mana hal tersebut sesuai dengan gelar istimewa yang disandang oleh provinsi ini. Hal tersebut juga merupakan salah satu penyebab tingkat kemiskinan di DIY menjadi tinggi, dimana dengan tingkat upah yang bisa dikatakan rendah dan didukung oleh pola konsumsi masyarakat yang hemat dan lebih mengandalkan sumber daya alam di sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Agustina, 2023). Sehingga, fenomena tersebut mempengaruhi pengeluaran masyarakat yang menjadi tolok ukur dari perhitungan tingkat kemiskinan itu sendiri.

Tingkat kemiskinan provinsi yang terdapat di Pulau Jawa, yang mana tingkat kemiskinan tertinggi berada di Provinsi DIY. Di tahun 2022 tingkat kemiskinan di Provinsi DIY sebesar 11,49%, disusul oleh Jawa Tengah 10,98%, Jawa Timur 10,49%, Jawa Barat 7,98%, Banten 6,24%, dan DKI Jakarta

4,61%. Dengan latar belakang tersebut maka, peneliti ingin menganalisis mengapa tingkat kemiskinan di Provinsi DIY selalu yang tertinggi di Pulau Jawa dalam 10 tahun terakhir ini. Meskipun dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan, akan tetapi Provinsi DIY tetap menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Jawa. Berlandaskan data tersebut yang menyebutkan Provinsi DIY merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Jawa, namun hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan (Pemda DIY, 2023). Meskipun demikian, tingginya tingkat kemiskinan yang disebabkan adanya pola konsumsi yang unik tetaplah menjadi persoalan dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat juga penting dalam menggerakkan roda perekonomian Provinsi DIY itu sendiri.

Tingkat kemiskinan disini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM adalah suatu indikator pembangunan kualitas manusia itu sendiri (Saragih et.al., 2022). Komponen pengukuran IPM yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran yang mana komponen tersebut sangat penting untuk ditingkatkan karena akan berdampak pada produktivitas dan kenaikan pendapatan yang akan mengakibatkan tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan. Provinsi yang ada di Pulau Jawa pada tahun 2022 dengan tingkat IPM tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 81,65, kemudian diikuti oleh Provinsi DIY 80,64, Banten 73,32, Jawa Barat 73,12, Jawa Tengah 72,79, dan yang paling rendah adalah Provinsi Jawa Timur yaitu 72,75. Melihat data tersebut dapat diartikan bahwa IPM Provinsi DIY merupakan yang tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa IPM Provinsi DIY dalam 10 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan dan bahwa seharusnya dengan tingkat IPM yang tinggi juga meningkatkan produktivitas masyarakat dan bisa menekan tingkat kemiskinan yang ada.

Selain IPM, faktor lain yang menyebabkan kemiskinan adalah tingkat pengangguran. Besarnya tingkat pengangguran merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara

(Mukhtar et.al., 2019). Hal tersebut dikarenakan tidak terserapnya angkatan kerja yang pada akhirnya tidak mempunyai pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran sendiri akan menyebabkan permasalahan ekonomi dan sosial karena pengangguran harus menekan pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi dan hal tersebut juga akan mempengaruhi perputaran perekonomian apabila angka pengangguran terlalu tinggi. Pengangguran menjadi lebih fatal apabila terjadi pada kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang kemudian dapat mendorong mereka masuk ke dalam jurang kemiskinan. (Ningsih et.al., 2022). Angka pengangguran disini diukur menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT tertinggi provinsi yang ada di Pulau Jawa berada di Provinsi Jawa Barat yaitu 8,31%, kemudian disusul Banten 8,09%, DKI Jakarta 7,18%, Jawa Tengah 5,57%, Jawa Timur 5,49%, dan disusul oleh Provinsi DIY dengan TPT sebesar 4,06%. Dimana dapat diartikan TPT di Provinsi DIY merupakan yang terendah di Pulau Jawa dan dalam 10 tahun terakhir DIY adalah provinsi dengan TPT paling rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, meskipun pada tahun 2020 dan 2021 sempat mengalami kenaikan.

Berdasarkan data dari IPM dan TPT, Provinsi DIY merupakan provinsi dengan tingkat IPM dan TPT yang bisa dikatakan sangat baik apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa. Walaupun demikian, seharusnya tingkat konsumsi yang bisa diukur dengan daya beli masyarakat juga tinggi, yang mana daya beli sendiri termasuk dalam dimensi pengukuran IPM. Selain itu, daya beli masyarakat itu sendiri juga dipengaruhi oleh TPT yang mana artinya semakin banyak masyarakat yang tidak menganggur maka masyarakat juga memiliki pendapatan yang seharusnya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, hal tersebut juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebudayaan yang masih sangat kental dan terjaga di Provinsi DIY. Seperti halnya masyarakat Provinsi DIY masih banyak yang menganut filosofi jawa yaitu “nrimo ing pandum” yang artinya tidak tamak dan merupakan sikap yang sepenuhnya menerima dengan apa yang telah diberikan oleh

kehidupan (Rakhmawati, 2022). Filosofi tersebut sudah mengakar dalam masyarakat DIY yang berdampak pada pola konsumsi masyarakat yang seadanya dan tidak berlebihan apalagi ditambah dengan masih banyaknya sumber daya alam di sekitar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Fenomena tersebut menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan yang mana pengeluaran konsumsi masyarakat menjadi tolok ukurnya.

Studi perihal IPM mempengaruhi tingkat kemiskinan telah dilakukan oleh Sianturi et.al. (2021), Mukhtar et.al. (2019), Budhijana (2020), Yusuf & Dai (2020) yang menyebutkan bahwa IPM berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Saragih et.al. (2022) menemukan bahwa IPM berpengaruh akan tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla et.al. (2022) menemukan bahwa IPM tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan sektor lapangan pekerjaan di Provinsi DIY adalah sektor pertanian yang mana tidak memerlukan kualifikasi pendidikan yang tinggi dalam menerima tenaga kerja, banyak masyarakat lanjut usia yang tidak produktif, serta rendahnya standar hidup yang layak yang mana mengakibatkan IPM sendiri tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Sementara studi mengenai angka pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan telah dilakukan oleh Yosa (2022), Budhijana (2020), Ningsih et.al. (2022), Adinata & Yudistira (2022), Saragih et.al. (2022), Piang et.al. (2023) yang menemukan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh pengangguran. Sedangkan menurut penelitian dari Sianturi et.al. (2021), Mukhtar et.al. (2019), Yusuf & Dai (2020) mendapatkan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh pengangguran akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan yang artinya angka pengangguran tetap berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan akan tetapi pengaruhnya tidak begitu besar.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Provinsi DIY sebagai objek penelitian dikarenakan berdasarkan data statistika selama kurun waktu sekitar 11 tahun terakhir DIY merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Meskipun di topang dengan IPM yang tinggi dan TPT yang

paling rendah di Pulau Jawa, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini belum bisa menekan tingkat kemiskinan secara efektif. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu IPM dan angka pengangguran, yang mana belum terdapat penelitian yang menggunakan variabel tersebut secara bersamaan dengan objek Provinsi DIY, dan juga penelitian ini diperkuat dengan data-data terbaru di tahun 2022, serta pada penelitian ini juga menjelaskan kondisi yang sebenarnya di Provinsi DIY terkait dengan permasalahan kemiskinan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh IPM dan angka pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY pada tahun 2012-2022 serta untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terkait permasalahan kemiskinan di Provinsi DIY.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam segala aspek kehidupan (Saragih et.al., 2022). Menurut Badan Pusat Statistik (2023), untuk mengukur tingkat kemiskinan digunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dimana konsep tersebut mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* sebagaimana yang dikeluarkan oleh World Bank. Melalui pendekatan tersebut, penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan pengeluaran minimum berdasarkan nominal nilai rupiah yang dibutuhkan oleh seseorang selama sebulan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator tingkat kemiskinan menggunakan persentase penduduk miskin, dimana *Head Count Index* (HCI-P0) merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Nurkse (1961) dengan bukunya yang berjudul *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries* menyatakan bahwa “a country is poor because it is a poor” menjelaskan teori terkait dengan lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) bahwa ketertinggalan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) yang tercermin pada IPM yang rendah, ketidaksempurnaan pasar, dan modal yang kurang mengakibatkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan penurunan pendapatan dimana rendahnya upah yang didapatkan dibawah minimum. Rendahnya pendapatan akan berakibat pada rendahnya tabungan dan investasi. Investasi akan berpengaruh terhadap akumulasi modal dimana juga akan mempengaruhi proses penciptaan lapangan pekerjaan yang akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang rendah dan sampai meningkatkan pengangguran dan itu semua akan mengakibatkan kenaikan tingkat kemiskinan.

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu faktor yang mempengaruhi angka tingkat kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Salsabilla et.al., 2022). Menurut Nugroho et.al. (2021), IPM adalah sebuah indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia yang mana menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil dari pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan yang lainnya.

IPM memiliki tiga komponen yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran. Dimensi kesehatan disini mengambil indikator Angka Harapan Hidup (AHH), untuk dimensi pendidikan mengambil indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) & Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan dimensi pengeluaran mengambil indikator pengeluaran per-kapita yang disesuaikan dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP) (Badan Pusat Statistik, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik (2023), perhitungan IPM yaitu dengan melakukan rata-rata geometrik dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Teori pertumbuhan baru oleh Mankiw et.al. (1992) dalam “*A Contribution to the Empirics of Economic Growth*”, menjelaskan terkait peranan pemerintah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas modal manusia (*human capital*) yang mendorong peningkatan produktivitas. Peningkatan modal manusia menjadikan tenaga kerja yang lebih produktif dikarenakan dengan ilmu pengetahuan yang diinvestasikan melalui pendidikan dan keterampilan, modal manusia dapat



mengembangkan teknologi yang ada dan juga mengerti terkait tata cara penggunaan teknologi dan sumberdaya yang ada. Sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dalam menunjang produktivitas yang juga dibarengi dengan peningkatan pendapatan yang akan menekan tingkat kemiskinan yang ada.

**Pengangguran**

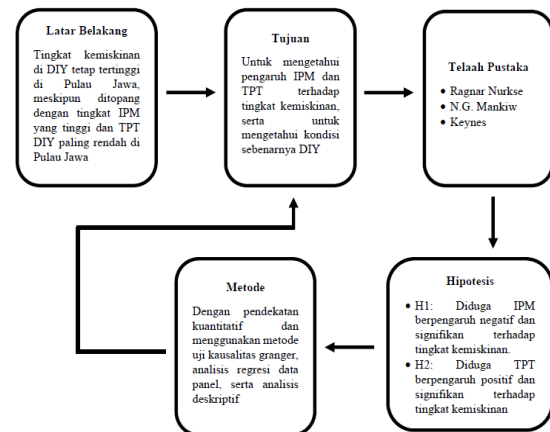
Kemiskinan merupakan permasalahan yang salah satu penyebabnya adalah tingginya tingkat pengangguran (Piang et.al., 2023). Mankiw (2016) menyatakan bahwa, pengangguran merupakan permasalahan makro ekonomi yang paling mempengaruhi masyarakat secara langsung dan kemiskinan sendiri merupakan permasalahan yang paling berat. Bagi kebanyakan masyarakat, pengangguran yang disebabkan karena kehilangan pekerjaan dapat diartikan bahwa standar kehidupan juga akan mengalami penurunan. Pengangguran adalah seseorang yang telah dikategorikan menjadi angkatan kerja dan sedang berusaha aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah yang ditargetkan, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan (Muchtolifah, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam mengukur angka pengangguran yang ada. TPT merupakan persentase jumlah masyarakat yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja, dimana angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) baik yang sedang bekerja, mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, maupun yang menanggur (Badan Pusat Statistik, 2023). Pengangguran juga bisa terjadi dikarenakan jumlah angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang ada, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan banyak angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan dan berujung pada meningkatnya TPT (Chandra, 2016).

Teori Keynes (dalam Setyawan et.al., 2021) permintaan agregat (*aggregate demand*) yang rendah menyebabkan permasalahan pengangguran. Saat permintaan tenaga kerja naik maka tingkat upah akan turun, akan tetapi posisi seperti ini perusahaan merugi. Turunnya tingkat upah akan berakibat turunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Dengan demikian, turunnya daya beli masyarakat akan

mengakibatkan produsen merugi dan akhirnya produsen akan mengurangi produksi dimana hal tersebut juga akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Pengurangan produksi akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja yang pada akhirnya rendahnya permintaan tenaga kerja akan mengakibatkan pengangguran.

**Kerangka Pikir Penelitian**



**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**

Sumber: Penulis (2023)

**Pengembangan Hipotesis**

Ditinjau dari penelitian terdahulu mengenai variabel IPM yang diteliti oleh Sianturi et.al. (2021), Mukhtar et.al. (2019), Budhijana (2020), Yusuf & Dai (2020), Saragih et.al. (2022), Salsabilla et.al. (2022) dimana empat dari enam penelitian menyatakan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan penelitian terdahulu mengenai variabel pengangguran yang diteliti oleh Yosa (2022), Budhijana (2020), Ningsih et.al. (2022), Adinata & Yudistira (2022), Saragih et.al. (2022), Piang et.al. (2023), Sianturi et.al. (2021), Mukhtar et.al. (2019), Yusuf & Dai (2020) dimana enam dari sembilan penelitian menyatakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Maka, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Diduga IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
- H2: Diduga TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

**METODE**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian 5 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi DIY pada tahun 2012-2022 yang berjumlah sebanyak 55 observasi. Untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sumber data berasal dari situs resmi seperti BPS dan juga situs resmi milik Pemprov DIY maupun Pemda kota/kabupaten yang ada di DIY.

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan uji kausalitas granger untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kausalitas antar variabel tingkat kemiskinan, IPM, dan TPT. Kemudian juga menggunakan analisis regresi data panel, yang dikarenakan regresi data panel merupakan suatu model regresi yang observasi datanya didasarkan pada data panel (Supandi et.al., 2022). Regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen dengan struktur data berupa data panel (Alamsyah et.al., 2022). Selain itu, juga menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi sebenarnya di Provinsi DIY. Pada penelitian ini perhitungannya dibantu dengan menggunakan *software* E-Views 12 version. Berikut model persamaan regresi data panel:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

- $Y_{it}$  = Tingkat Kemiskinan (Persen)
- $\alpha$  = Konstanta
- $X_1$  = IPM (Indeks)
- $X_2$  = TPT (Persen)
- $\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi
- $i$  = Kabupaten/Kota
- $t$  = Tahun
- $\varepsilon$  = *Error Term*

Junaidi (dalam Hasibuan et.al., 2020) menyebutkan bahwa dalam regresi data panel dilakukan uji model, dimana bertujuan untuk menemukan model terbaik dengan tiga metode yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Ketiga metode tersebut diuji dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Kemudian setelah itu dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari penelitian

ini menggunakan data yang valid (Gujarati & Potter, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Analisis Data**

**Tabel 1. Hasil Penentuan Lag Optimum**

Lag	LogL	AIC	SIC
0	-234,4247	13,56713	13,70044
1	-83,53018	5,458867*	5,992129*
2	-75,44277	5,511016	6,444224
3	-67,07118	5,546925	6,880080
4	-59,92386	5,652792	7,385894

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Dapat dilihat dari hasil penentuan lag optimum menunjukkan bahwa lag yang dipilih adalah lag 1 yang mana menunjukkan nilai AIC (*Akaike's Information Criterion*) dan SIC (*Schwarz Information Criterion*) yang paling rendah. Nilai AIC dan SIC yang rendah dianggap lebih baik dalam memperkirakan hubungan kausalitas antar variabel. Setelah melakukan penentuan lag optimum, akan dilakukan uji kausalitas granger itu sendiri.

**Tabel 2. Hasil Uji Kausalitas Granger**

Null Hypothesis	Obs	F-Statistic	Prob.
<i>IPM does not Granger Cause KEMISKINAN</i>			
	50	1,40956	0,2411
<i>KEMISKINAN does not Granger Cause IPM</i>			
		0,52442	0,4726
<i>TPT does not Granger Cause KEMISKINAN</i>			
	50	2,54545	0,1173
<i>KEMISKINAN does not Granger Cause TPT</i>			
		12,1063	0,0011
<i>TPT does not Granger Cause IPM</i>			
	50	2,60538	0,1132

<i>IPM does not Granger Cause TPT</i>	13,2025	0,0007
---------------------------------------	---------	--------

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Hasil uji kausalitas granger diatas menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas dua arah. Adanya hubungan kausalitas disini dapat dilihat apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha ( $prob < 0,05$ ). Untuk selanjutnya dikarenakan tidak terdapatnya hubungan kausalitas dua arah, maka untuk lebih jelasnya mengenai hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen akan dianalisis menggunakan regresi data panel.

**Tabel 3. Hasil Uji Chow**

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	71,385218	(4,48)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	106,621042	4	0,0000

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan uji chow di atas, menjelaskan bahwa nilai probabilitas untuk Cross-section F dan *Cross-section Chi-square* yaitu sebesar 0,0000 yang mana dapat diartikan bahwa nilainya lebih kecil dari alpha ( $0,0000 < 0,05$ ). Maka model terbaiknya adalah model Fixed Effect Model (FEM).

**Tabel 4. Hasil Uji Hausman**

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Square Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section Random</i>	0,772027	2	0,6798

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Hasil uji hausman di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari Cross-section random yaitu sebesar 0,6798 yang mana dapat

diartikan bahwa nilainya lebih besar dari alpha ( $0,6798 > 0,05$ ). Maka model terbaiknya adalah model *Random Effect Model* (REM).

**Tabel 5. Hasil Uji LM**

	<i>Cross-section</i>	<i>Test Hypothesis Time</i>	<i>Both</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	179,9559	2,914127	182,8701
	(0,0000)	(0,0878)	(0,0000)

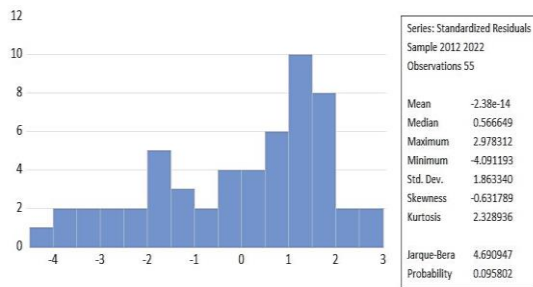
Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Hasil Uji LM yaitu menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p-value) *Cross-section* dari Breush-Pagan yaitu sebesar 0,0000 yang mana dapat diartikan bahwa nilainya lebih kecil dari alpha ( $0,0000 < 0,05$ ). Maka model terbaiknya adalah model *Random Effect Model* (REM).

Jadi dapat disimpulkan dari hasil uji penentuan model terbaik yang mana menghasilkan model terbaik yaitu Random Effect Model (REM) dan model tersebut yang pada akhirnya akan dipakai untuk menginterpretasikan hasil regresi data panel untuk penelitian ini.

Sebelum masuk pada hasil regresi data panel maka dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang sebenarnya tidak wajib dilakukan untuk model REM. Menurut Gujarati & Potter (2009) juga menyatakan model REM menggunakan metode Generalized Least Squares (GLS) yang sebenarnya tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena model tersebut telah memenuhi uji asumsi klasik. Selain itu, GLS sendiri dapat mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi yang mana tidak perlu dilakukan uji tersebut lagi dalam asumsi klasiknya (Melati & Suryowati, 2018). Dengan demikian, pada penelitian ini tetap dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji multikolinieritas untuk memastikan bahwa data yang ada berdistribusi dengan normal dan tidak terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi.

**Uji Asumsi Klasik**



**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas**

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Hasil dari uji normalitas di atas adalah nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,095802 yang dapat diartikan bahwa nilainya lebih besar dari nilai alpha ( $0,095802 > 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

	Correlation	
	IPM	TPT
IPM	1,000000	0,806540
TPT	0,806540	1,000000

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Pada uji multikolinearitas di atas menggunakan metode matriks korelasi antar variabel bebas, dimana hasil dari uji multikolinieritas dianggap tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi apabila nilai korelasi antar variabel bebas tidak melebihi 0,90 (Ghozali, 2013). Pada tabel di atas menunjukkan hasil bahwa nilai korelasi antar variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu sebesar 0,806540 yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,90 ( $0,806540 < 0,90$ ) dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada variabel bebas.

**Uji Regresi Data Panel**

**Tabel 7. Hasil Estimasi Model REM**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	84,65741	19,02488	0,0000
IPM	-0,923404	-16,32020	0,0000
TPT	0,236864	2,316902	0,0245
<i>R-squared</i>		0,840487	

<i>Adjusted R-squared</i>	0,834352
<i>F-statistic</i>	136,9958
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000000

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Dari tabel diatas menunjukkan hasil dari regresi data panel menggunakan REM dan didapatkan hasil perhitungan pengaruh variabel independen yaitu IPM (X1) dan TPT (X2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) yang mana dalam bentuk persamaannya yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = 84,65741 - 0,923404 X_{1it} + 0,236864 X_{2it} + \epsilon_{it}$$

**Uji T (Parsial)**

Uji T atau uji parsial disini digunakan untuk pembuktian hipotesis dan juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan dari antar variabel independen terhadap variabel dependennya.

a. Indeks Pembangunan Manusia (X1)

Berdasarkan dari hasil uji T pada tabel regresi model REM menunjukkan nilai T hitung sebesar -16,32020 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Hal tersebut menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel ( $16,32020 > 2,00664$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai alpha ( $0,0000 < 0,05$ ) dan juga nilai koefisien dari variabel IPM sebesar -0,923404. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, IPM disini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian dapat diartikan bahwa dengan nilai koefisien sebesar -0,923404 yang mana apabila nilai IPM meningkat sebesar 1% sedangkan nilai dari variabel lain tetap, maka nilai dari tingkat kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,923404. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai IPM maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami penurunan.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (X2)

Hasil uji T menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,316902 dengan tingkat signifikansi 0,0245. Hal tersebut menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel ( $2,316902 > 2,00664$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai alpha



( $0,0245 < 0,05$ ) dan juga nilai koefisien dari variabel TPT sebesar 0,236864. Dengan demikian dapat disimpulkan secara parsial bahwa, TPT disini berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian dapat diartikan bahwa dengan nilai koefisien sebesar 0,236864 yang mana apabila nilai TPT meningkat sebesar 1% sedangkan nilai dari variabel lain tetap, maka nilai dari tingkat kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,236864. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai TPT maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami peningkatan.

### Uji F (Simultan)

Uji F atau uji simultan disini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan hasil dari regresi model REM menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 136,9958 yang mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai F tabel yaitu sebesar 3,1751 ( $136,9958 > 3,1751$ ) dan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,0000 dimana lebih kecil dari nilai alpha ( $0,0000 < 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, variabel IPM (X1) dan TPT (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan (Y).

### Koefisien Determinasi

*R-squared* (R<sup>2</sup>) disini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variasi nilai dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Berdasarkan hasil dari regresi model REM menunjukkan bahwa nilai dari *R-squared* (R<sup>2</sup>) sebesar 0,840487 atau senilai 84,0487%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen atau variabel IPM (X1) dan TPT (X2) dapat menjelaskan dan mempengaruhi tingkat kemiskinan (Y) sebesar 84,0487%, untuk sisanya yaitu sebesar 15,9513% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang

mana sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini. Hasil tersebut juga sesuai dengan teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu teori Nurkse tentang lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) bahwa keteringgalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin pada IPM yang rendah akan mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat (Nurkse, 1961). Rendahnya produktivitas masyarakat dapat dikatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak produktif yang mana pendapatan yang mereka dapatkan juga akan rendah. Hal tersebut yang nantinya membuat masyarakat akan jatuh pada jurang kemiskinan yang dikarenakan pendapatan yang mereka dapatkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan data yang ada, peningkatan IPM juga diiringi dengan kecenderungan tingkat kemiskinan yang menurun yang mana hal tersebut juga sesuai dengan hasil dari penelitian ini. Dengan demikian, peran pemerintah juga sangatlah penting untuk meningkatkan IPM seperti pada teori pertumbuhan baru dalam "*A Contribution to the Empirics of Economic Growth*" yang menjelaskan bahwa pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan kualitas modal manusia (*human capital*) yang mendorong peningkatan produktivitas dan juga dibarengi oleh peningkatan pendapatan (Mankiw et.al., 1992).

Hasil dari penelitian ini didukung dan selaras dengan penelitian terdahulu, seperti Sianturi et.al. (2021), Mukhtar et.al. (2019), dan Budhijana (2020) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingginya tingkat IPM yang ditunjang dengan pendidikan yang memadai akan meningkatkan peluang masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak dan otomatis juga mendapatkan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hal tersebut pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

### Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa TPT mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY. Hasil tersebut sejalan dengan hipotesis yang telah ditetapkan pada penelitian

ini dan juga sejalan dengan teori Nurkse yang menyatakan bahwa yang awalnya dari rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), ketidaksempurnaan pasar, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, rendahnya tabungan dan investasi, sampai mempengaruhi akumulasi modal yang mana akan mempengaruhi proses penciptaan lapangan pekerjaan dan hal tersebut jika terjadi juga akan meningkatkan angka pengangguran yang ada sehingga tingkat kemiskinan juga akan meningkat (Nurkse, 1961).

Dengan demikian hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa rendahnya TPT akan menekan tingkat kemiskinan yang ada, dikarenakan semakin rendah angka pengangguran maka dapat dikatakan banyak masyarakat yang bekerja dan mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi sehingga mempunyai pendapatan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan dari hasil penelitian ini yang menyatakan pentingnya tingkat pengangguran yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, maka peranan pemerintah disini dibutuhkan untuk menjaga kestabilan perekonomian agar tidak mengakibatkan rendahnya permintaan agregat tenaga kerja. Hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, seperti yang dikatakan Keynes terkait dengan permintaan agregat yang rendah akan menyebabkan permasalahan pengangguran (Setyawan et.al., 2021).

Selain itu, hasil dari penelitian ini juga didukung dan sejalan dengan hasil dari penelitian terdahulu, seperti Yosa (2022), Budhijana (2020), Ningsih et.al. (2022), Adinata & Yudistira (2022), Saragih et.al. (2022), Piang et.al. (2023) yang menyatakan bahwa angka pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan menekan angka pengangguran disini menjadi hal yang penting agar masyarakat bisa mempunyai pendapatan yang cukup dan terhindar dari kemiskinan. Besarnya pengangguran sendiri juga merupakan salah satu hal yang penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang dikarenakan pengangguran merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat sebagai kompensasi hasil dari pembangunan ekonomi itu sendiri.

### **Analisis Deskriptif Kondisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Provinsi DIY merupakan provinsi dengan gelar keistimewaan yang mana dari struktur pemerintahan sampai dengan budaya masyarakat yang masih kental (Luthfi et.al., 2009). Hal tersebut yang membedakan provinsi ini dengan provinsi yang lainnya, dimana hal tersebut juga membedakan cara penanganan permasalahan yang ada, termasuk permasalahan kemiskinan. Meskipun data statistik BPS menyebutkan DIY sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, kondisi sebenarnya berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang unik. Pola konsumsi khas di DIY mempengaruhi cara mengukur kemiskinan. BPS mengukur tingkat kemiskinan dengan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dimana penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan data statistik, kemiskinan di Provinsi DIY didominasi oleh Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul yang sektor pariwisatanya produktif, tetapi mayoritas masyarakatnya masih memanfaatkan sumber daya alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (DPRD DIY, 2021).

Pernyataan di atas dapat dibuktikan bahwa dengan adanya program dari Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul yang mengangkat program menghidupkan kembali pengetahuan lokal karangkitri. Karangkitri sendiri merupakan konsep *home garden* atau dalam pedesaan jawa sering disebut dengan pekarangan rumah. Praktik karangkitri tersebut, dalam budaya jawa dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk kawasan penanaman tanaman pangan, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah dengan tujuan untuk ketahanan pangan keluarga (Trisakti Pilar Persada, 2022). Dengan demikian, program tersebut dapat menunjukkan kemandirian pangan dengan mengandalkan pekarangan rumah yang mana juga menekan pengeluaran pembelian bahan pangan keluarga. Selain pekarangan tersebut dimanfaatkan menjadi home garden, menurut Trisakti Pilar Persada (2022) karangkitri tersebut juga dimanfaatkan sebagai kawasan peternakan seperti ayam, kambing, sapi, dan yang lainnya.

Hewan ternak tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana bisa dikonsumsi maupun bisa digunakan untuk investasi.

Selain itu, kondisi sosial dan budaya masyarakat DIY ini tercerminkan oleh keberadaan abdi dalem. Abdi dalem merupakan masyarakat DIY yang mengabdikan dirinya kepada raja keraton Kasultanan Yogyakarta. Abdi dalem juga merupakan abdi budaya yang mana menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas yang khususnya masyarakat DIY. Abdi dalem memaknai konsep hidup yang sejahtera tentunya lahir dari kondisi sosial dan budaya yang telah diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang seperti filosofi “ana dina ana upa, obah mamah” yang dapat diartikan bahwa jika masih ada hari, rezeki tentu tetap ada, dan setiap orang yang mau bekerja tentu akan meraih rezeki itu sendiri (Nurmasanti, 2017). Dengan filosofi tersebut, akan menuntun masyarakat ke filosofi berikutnya yaitu “nrimo ing pandum”. Abdi dalem memaknai kesejahteraan hidup dengan menggunakan indikator ketentraman batin secara spiritual dan juga kebahagiaan yang tidak ternilai.

Menjadi seorang abdi dalem itu bukan berarti untuk mendapatkan gaji yang tinggi, tetapi lebih ditekankan pada pencapaian ketentraman batin dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya (Nurmasanti, 2017). Seiring dengan perkembangan zaman yang mana keraton memerlukan lebih banyak tenaga yang profesional menyebabkan banyak abdi dalem yang memiliki Pendidikan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa abdi dalem sendiri tidak selalu identik dengan orang yang lanjut usia dan berpendidikan rendah (Nurmasanti, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tingkat pendidikan tinggi tetap saja mengikuti budaya yang telah turun temurun yang mana pemaknaan dalam kehidupannya juga tidak seperti layaknya manusia modern. Dengan kondisi tersebut, menjadikan ukuran BPS terkait permasalahan kemiskinan di DIY kurang efisien karena banyak fenomena yang disebabkan kondisi sosial budaya DIY tidak bisa dihitung atau diukur secara statistik.

Pola konsumsi masyarakat Provinsi DIY yang sedemikian rupa juga dipengaruhi oleh kondisi budaya jawa yang sangat kental yang mana memegang erat filosofi “nrimo ing

pandum” yang membuat masyarakat menghemat dan tidak berlebihan (Rakhmawati, 2022). Dengan pola konsumsi yang unik dan juga masyarakat lebih memilih untuk investasi aset tersebut membuat ada beberapa data yang dalam perhitungan BPS itu tidak termasuk, hal tersebutlah yang membuat hasil dari perhitungan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY menjadi tinggi (Rinepta, 2023). Mengalokasikan uangnya untuk investasi aset menjadikan budaya menabung masyarakat DIY lebih kuat daripada untuk konsumsi. Dapat dilihat dari tingkat simpanan masyarakat di bank yang mana selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat kredit. Secara rata-rata rasio kredit dibandingkan dengan simpanan rumah tangga di DIY selama 10 tahun terakhir berkisar 66,78%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan rendah apabila dibandingkan dengan rasio idealnya 80%-90% (Pemda DIY, 2023).

Pada intinya, indikator BPS tidaklah salah akan tetapi kalau ingin melihat kondisi masyarakat Provinsi DIY secara objektif harus dilihat secara multidimensi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya fenomena non transaksional yang tidak tercatat secara statistika yang mengakibatkan biasanya penggambaran kondisi sebenarnya DIY terkait permasalahan kemiskinan secara detail. Berdasarkan kondisi tersebut yang mana tidak bisa diukur dengan indikator perhitungan tingkat kemiskinan secara statistik, yang juga sangatlah bertolak belakang dengan teori Nurkse yang menjelaskan bahwa lingkaran setan kemiskinan tersebut berdampak pada rendahnya investasi dan tabungan. Sedangkan, dengan tingginya IPM dan rendahnya TPT yang mana dapat dikatakan masyarakat Provinsi DIY tingkat produktivitasnya yang tinggi, akan tetapi dengan keunikan kondisi yang ada di DIY itu membuat tidak bisa tergambarkannya secara statistik terkait dengan permasalahan kemiskinan itu sendiri. Ditambah dengan adanya mindset yang didasarkan oleh kondisi budaya yang masih kental dan juga pola konsumsi yang sedemikian rupa sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat tetap belum bisa menjadikan Provinsi DIY berdasarkan BPS menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang rendah di Pulau Jawa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh IPM yang mana dapat dikatakan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk menunjang produktivitas masyarakat. Tingginya IPM akan meningkatkan peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga akan menghasilkan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut tentunya akan menekan tingkat kemiskinan yang ada dikarenakan indikator pengukuran tingkat kemiskinan menggunakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Selain itu, tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh angka pengangguran dimana angka pengangguran disini menggunakan indikator TPT. Indikator TPT menjelaskan bahwa besaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Rendahnya TPT akan menekan tingkat kemiskinan dikarenakan semakin rendah angka pengangguran dapat dikatakan banyak masyarakat yang bekerja dan mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi sehingga mempunyai pendapatan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya serta terhindar dari permasalahan kemiskinan.

Akan tetapi, berdasarkan kondisi sebenarnya tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tidaklah seperti perhitungan BPS. Tingkat kemiskinan Provinsi DIY dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat seperti hidup sederhana dan lebih mengutamakan ketentraman batin dan spiritual daripada hal duniawi. Kemudian juga dipengaruhi pola konsumsi masyarakat yang sederhana dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar dan budaya menabung masyarakat yang kuat sehingga tidak bisa terukur dengan indikator statistika BPS. Dengan demikian, BPS belum bisa menggambarkan kondisi kemiskinan di DIY dikarenakan banyak fenomena non transaksional yang tidak tercatat secara statistika yang mengakibatkan biasanya penggambaran kondisi DIY secara detail terkait dengan permasalahan kemiskinan.

### Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, beberapa saran yang dapat

diberikan kepada Pemerintah Provinsi DIY diantaranya yakni meningkatkan IPM melalui peningkatan akses pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, dan peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan. Kemudian dengan menekan angka pengangguran melalui perluasan peluang kerja dan memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat. Untuk melihat tingkat kemiskinan DIY menggunakan pendekatan kontekstual dan multi dimensi serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial budaya yang ada Provinsi DIY. Dalam program-program pengentasan kemiskinan diharapkan adanya kolaborasi antar *stakeholder* dan juga melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala agar program tersebut berjalan secara efektif.

Dikarenakan terdapat keterbatasan pada penelitian ini, saran untuk peneliti selanjutnya adalah dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan berbagai variabel terkait untuk semakin memperkuat hasil analisis atau bisa dengan menggunakan ukuran secara mikro agar hasil analisisnya bisa menjelaskan kondisi yang lebih detail.

### IMPLIKASI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk merumuskan upaya-upaya untuk mendorong pengentasan kemiskinan yang ada di Provinsi DIY melalui peningkatan IPM dan penurunan TPT. Kemudian juga, penelitian ini berguna apabila ingin melihat kondisi sebenarnya permasalahan kemiskinan.

### KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan pada penelitian ini adalah masih menggunakan lingkup makro untuk analisis permasalahannya yang mana sebenarnya lebih baik menggunakan lingkup mikro agar bisa menggambarkan secara detail permasalahan kemiskinan yang ada di Provinsi DIY. Selain itu, juga peneliti mempunyai keterbatasan terkait dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selain yang ada di penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

Adinata, Y., & Yulistira, M. R. (2022). Determinan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2021. *JSMART Jurnal Statistik, Ekonomi, Keuangan, Sumber Daya*



- Manusia, Dan Teknologi Informasi*, Vol 01. No.
- Agustina, P. (2023). *Mencermati Peliknya Upah Murah dan Kemiskinan di Yogyakarta. Penelitian Dan Pengembangan Kompas*. [https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/16/mencermati-peliknya-upah-murah-dan-kemiskinan-di-yogyakarta?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/16/mencermati-peliknya-upah-murah-dan-kemiskinan-di-yogyakarta?status=sukses_login&status_login=login)
- Alamsyah, I. F., Esra, R., Awalia, S., & Nohe, D. A. (2022). Analisis Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 254–266.
- Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian dan Penerapannya* (Edisi 1). IPB Press.
- Angga, T. S. (2018). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Indonesia Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 296–311.
- Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>
- Badan Pusat Statistik. (2023a). Indeks Pembangunan Manusia. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). Kemiskinan dan Ketimpangan. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan>
- Badan Pusat Statistik. (2023c). Tingkat Pengangguran Terbuka. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja>
- Bappeda DIY. (2022). Pengentasan Kemiskinan. Balai Penelitian, Pengembangan Dan Statistika Daerah Bappeda DIY. <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/infografik/kemiskinan>
- Budhijana, R. B. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.35384/jemp.v5i1.170>
- Chandra, T. P. (2016). *Esensi Ekonomi Makro* (1st ed.).
- DPRD DIY. (2021). Problematika Kemiskinan di DIY antara Data, Fakta dan Usaha Pemda DIY Untuk Mengatasinya. E-Parlemen DPRD DIY. <https://www.dprd-diy.go.id/kemiskinan-di-diy-antara-data-fakta-dan-usaha-pemda-diy/>
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS (Edisi 7). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, N. D., & Potter, C. D. (2009). *Basic Econometrics* (N. Fax (ed.); 5 th ed). Douglas Reiner.
- Hasibuan, S. L., Rujiman, & Sukardi. (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(2), 139–141.
- Luthfi, A. D., S Nazir, M., Tohari, A., Winda, A. D., & Tristiawan, C. D. (2009). *Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan* (E. Soetarto (ed.); Cetakan 1). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics* (9th ed.). Worth Publishers.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, N. D. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437. <https://doi.org/10.2307/2118477>
- Melati, P. M., & Suryowati, K. (2018). Aplikasi Metode Common Effect, Fixed Effect, Dan Random Effect Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 3(1), 41–51. <http://ipm.bps.go.id/>
- Muchtolifah. (2010). *Ekonomi Makro*. Unesa University Press.
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Ecoplan: Journal of Economics and Development*



- Studies*, 2(2), 77–89. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v2i2.20>
- Ningsih, A. W., Fitriyana, R., Hernisyafitri, N., & Sungkono. (2022). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR)*, 1–8.
- Nugroho, A., Clarissa, A., & Utami, N. P. C. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia* (W. Winardi & Y. Karyono (eds.)). Badan Pusat Statistik.
- Nurkse, R. (1961). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries* (pp. 1–31). Oxford University Press New York.
- Nurmasanti, A. (2017). *Kesejahteraan Dalam Perspektif Abdi Dalem Keraton Kesultanan Yogyakarta*. In UIN Sunan Kali Jaga.
- Pemda DIY. (2023a). BI Nilai Upaya Pengentasan Kemiskinan DIY Membuahkan Hasil. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://jogjapro.go.id/berita/bi-nilai-upaya-pengentasan-kemiskinan-diy-membuahkan-hasil>
- Pemda DIY. (2023b). Kemiskinan DIY Masih Menjadi PR. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://jogjapro.go.id/berita/ahh-tertinggi-di-indonesia-kemiskinan-diy-masih-menjadi-pr>
- Piang, H., Tri, I., & Fitrianti, R. (2023). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Investasi Dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan di Indonesia*. 4(1), 250–260. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i1.287>
- Rakhmawati, S. M. (2022). Nrimo Ing Pandum Dan Etos Kerja Orang Jawa: Tinjauan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pancasila*, 3(1), 7–19.
- Rinepta, G. A. (2023). *Penyebab DIY Jadi Provinsi Termiskin di Jawa Versi BPS*. Detikcom. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6531759/sekda-ungkap-penyebab-diy-jadi-provinsi-termiskin-di-jawa-versi-bps/2>
- Salsabilla, A., Juliannisa, I. A., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ikra-Ith Ekonomika*, 5(2), 96–105.
- Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. *Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 71–79. <https://ulilalbabinstitute.com/index.php/PEESHUM/article/view/36/96>
- Setyawan, A., Suparta, I. W., & Aida, N. (2021). Globalisasi Ekonomi Dan Pengangguran: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 10(3), 263. <https://doi.org/10.26418/jebik.v10i3.49278>
- Sianturi, V. G., Syafii, M., & Tanjung, A. A. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.42-70>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 13). Alfabeta, CV.
- Supandi, E. D., Yulianti, R., & Fauzy, A. (2022). *Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM di Kabupaten / Kota Provinsi DIY*. 22(2), 157–163.
- Trisakti Pilar Persada. (2022). *Kajian Pengetahuan Lokal Karangkitri dan Ekonomi Sirkular*.
- Yosa, A. (2022). Analisis Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(1), 172–179. <https://doi.org/10.29313/bceses.v2i1.2352>
- Yusuf, L. A., & Dai, S. I. (2020). The Impact of Unemployment and Human Development Index on Poverty in Gorontalo Province 2008-2017. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(1), 7–16. <https://doi.org/10.37479/jej.v2i1.4495>